

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Instansi pemerintah, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan (Kawedar, 2008).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Dan tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya (IAI,2015).

Laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana public baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah selama satu periode laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan

belanja daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah, untuk menyusun kebijakan akuntansi (pasal 97 : kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi). Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 239 ayat (1) menyatakan : kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Kewajiban penyusunan laporan keuangan pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada kementerian lembaga masing-masing dan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya menteri keuangan menyusun laporan arus kas dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan untuk disampaikan kepada Presiden.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No. 24 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 71 tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yakni :

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*).

c. Tepat waktu (*timeliness*).

d. Lengkap.

2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada tingkat level pemakai, tingkat pemahaman, pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

a. Dapat diuji kebenarannya (*verifiable*).

b. Netral.

c. Penyajian secara wajar/jujur (*representational faithfulness*).

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna.

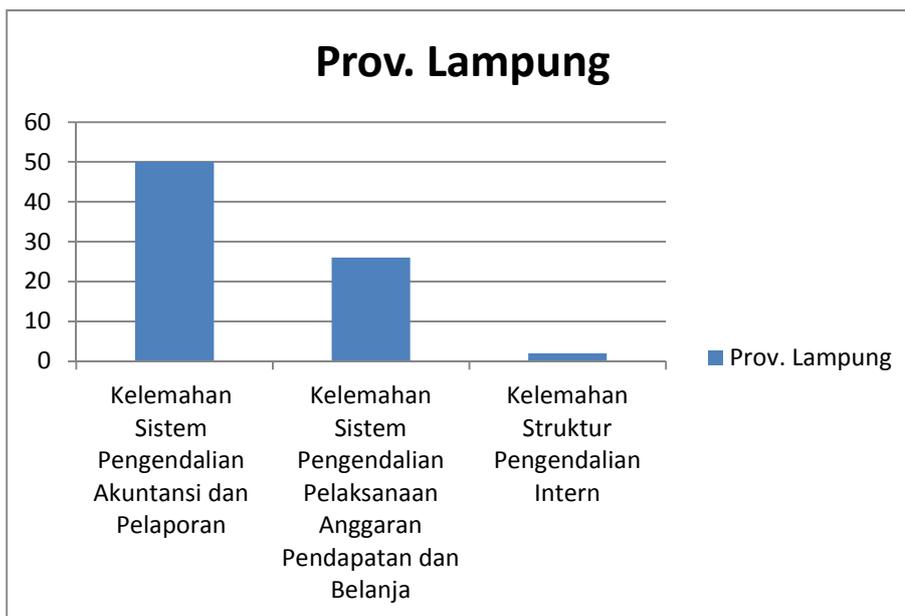
Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/WaliKota menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) , artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar

dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Tabel 1.1

**Daftar Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan LKPD Semester 1 Tahun 2014
(Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung)**



Tabel 1.2

Kelompok Temuan Akibat Ketidapatuhan

| No | Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai (Juta Rp) |
|----|-------------------------|--------------|------------------|
| 1 | Kerugian daerah | 72 | 25.602,15 |
| 2 | Potensi kerugian daerah | 8 | 4.919,03 |
| 3 | Kekurangan penerimaan | 18 | 6.706,70 |
| 4 | Administrasi | 59 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 9 | 12.454,02 |
| 6 | Ketidakefektifan | 9 | 6.534,19 |
| | Sub. Total | 175 | 56.216,09 |

Sumber : Laporan hasil pemeriksaan/ikhtisar hasil pemeriksaan sementara LHP/IHPS I 2014 (www.bpk.go.id). Di akses pada tanggal 19 Januari 2019, data diolah.

Dari tabel 1.1 dan 1.2 diatas memberikan penjelasan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan semester 1 tahun 2014 pada kabupaten/kota se- Provinsi Lampung menunjukkan adanya 125 kasus kelemahan SPI di pemerintah yang terdiri dari atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian internal. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014 menemukan sebanyak 175 kasus senilai Rp. 56.216,09 miliar menunjukkan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan : kerugian Negara, potensi kerugian Negara, dan kekurangan penerimaan. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan: kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 59 kasus senilai Rp. 12.454,02 miliar dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan. (BPK, IHPS, Semester 1, 2014).

Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Kenyataan didalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi. Banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini tidak wajar dan *disclaimer* karena dalam penyusunannya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang dapat ditemukan. Berikut ini merupakan opini BPK yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Metro :

Tabel 1.3

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009-2013

| LKPD (TAHUN) | OPINI | | | |
|-----------------|-------|-----|----|-----|
| | WTP | WDP | TW | TMP |
| 2009 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 2010 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| 2011 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| 2012 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 2013 | 5 | 9 | 1 | 0 |

Sumber : Laporan hasil pemeriksaan/ikhtisar hasil pemeriksaan sementara LHP/IHPS I 2014 (www.bpk.go.id).

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2009, dinyatakan bahwa terdapat 12 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 10 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 2 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan kompetensi yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2010 dan 2013, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya kepada 5 entitas, tahun 2011 dan 2012 sebanyak 7 entitas. Meskipun terdapat penurunan proporsi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang diikuti penurunan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kompetensi dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Tahun Anggaran (TA) 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kota Metro, pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Metro. Walau sudah empat kalinya mengantongi opini WTP, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Metro masih terdapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu catatan yang diberikan adalah masih belum tepatnya pencatatan aset-aset daerah Kota Metro.

Pemilihan SKPD Kota Metro sebagai objek penelitian karena Kota Metro dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada laporan keuangan. Maka dari itu diharapkan dengan adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama kurang lebih 4 tahun mempertahankan predikat WTP dan diharapkan mampu menjadi

mencontoh bagi daerah lain, kemudian peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai factor-faktor apa saja yang saat ini diperkuat Kota Metro sehingga mempertahankan predikat WTP tersebut walaupun opini tersebut masih ada keterangannya dengan paragraf penjelas. Dengan adanya predikat ini naja dapat diartikan bahwa pihak pemerintah sudah mampu menjalankan pengelolaan keuangan dan aset secara benar serta telah sesuai dengan aturan yang sebagaimana wujud dari komitmen untuk menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan transparan.

Maka penulis menarik kesimpulan bahwa permasalahan yang terjadi di Kota Metro adalah masih banyak kabupaten/kota se-provinsi Lampung yang belum melaporkan hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dan tidak memberikan bukti-bukti yang akurat terhadap transaksi laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran inspektorat daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bahwa mereka semua sangat berkaitan khusus terhadap laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pembuat laporan keuangan sebagai salah satu pengambilan keputusan untuk para pengguna laporan keuangan. Karena saling ketergantungan antara variabel satu dengan variabel lain, dan variabel tersebut beberapa contoh factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun penyebab dari permasalahan atas LKPD yang memperoleh opini tidak wajar adalah laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP, diantaranya: asset tetap, kas, belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan. (BPK, IHPS, Semester I, 2014).

Fenomena diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk (2014) yang mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintah memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut.

Menurut Siregar (2015), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh laporan keuangan daerah diantaranya yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Setiawati dan Sari (2014) melakukan sebuah penelitian yang membuktikan bahwa sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu Andini dan dkk (2015) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dan public secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu di pertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti di syaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang di syaratkan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Yuliani, 2010).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yaitu : Sudiarti et.al (2015) dan beberapa penelitian lainnya : Permadani (2013), Armando dan Fajrin (2013), Setiawati dan Sari (2014), Nurillah dan Muid (2014), Andini dan Yusrawati (2015). Bahwa terdapat beberapa signifikan yang berbeda dari masing-masing variabel kualitas laporan keuangan daerah, dan masih terbatasnya penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian adanya perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik penulis untuk di analisis kembali mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, waktu penelitian, serta masalah yang ada pada tempat penelitian.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Nurillah (2014) hanya saja waktu dan tempat penelitian yang berbeda. Masih sedikitnya penelitian tersebut dan perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik penulis untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menambahkan variabel, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Variabel penelitian ini didukung dari penelitian Yensi (2014) membuktikan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan

sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi mengakibatkan adanya perubahan mendasar dalam mengelola anggaran daerah (APBD) menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkan kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Perubahan mendasar tersebut adalah adanya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran (Mardiasmo, 2006).

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh laporan keuangan daerah, diantaranya yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Andini dan Yusrawati (2015) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu Fikri (2015) melakukan sebuah penelitian yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern (SPI), dan penerapan sistem akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro-Lampung (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro)

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan batasan objek penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh terhadap kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern pemerintah pemanfaatan teknologi informasi, dan peran inspektorat pada kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kota Metro.
2. Objek pada penelitian ini difokuskan kepada pegawai/karyawan yang bekerja di SKPD pemerintahan Kota Metro
3. Penulis melakukan penelitian pada tahun 2018.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di SKPD Pemerintah Kota Metro?
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?
3. Apakah Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?
5. Apakah Peran Inspektorat Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?

1.4 Tujuan Masalah Penelitian

Tujuan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di SKPD Pemerintah Kota Metro.
2. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di SKPD Pemerintah Kota Metro.
3. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di SKPD Pemerintah Kota Metro.
4. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di SKPD Pemerintah Kota Metro.
5. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh Peran Inspektorat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di SKPD Pemerintah Kota Metro.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memberikan suatu pengetahuan tentang pengaruh dari sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan peran inspektorat daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan, bahan referensi, dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada kajian ini.

3. Bagi Pemerintah Kota Metro

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam pertimbangan pengambilan keputusan tentang penempatan sumber daya manusia sesuai dengan

kebutuhan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menggunakan latar belakang masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variable dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai apa saja variable yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, mengenai apa saja populasi dan sampel yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi penjelasan mengenai nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis.

LAMPIRAN